



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

alan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes**
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA .PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

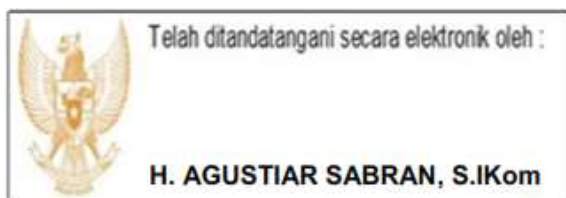
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
 Kalimantan Tengah 73112

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Urusan Di
 Fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data																												
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah. Nilai Akhir SAKIP $= (P_1 \times 30\%) + (P_2 \times 25\%) + (P_3 \times 15\%) + (P_4 \times 10\%) + (P_5 \times 20\%)$ Keterangan: P_1 = Nilai Perencanaan Kinerja P_2 = Nilai Pengukuran Kinerja P_3 = Nilai Pelaporan Kinerja P_4 = Nilai Evaluasi Internal P_5 = Nilai Capaian Kinerja Contoh Perhitungan Misalnya hasil evaluasi internal instansi memperoleh nilai: <table><thead><tr><th>Komponen</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Bobot x Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>80</td><td>30%</td><td>24</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>75</td><td>25%</td><td>18,75</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>85</td><td>15%</td><td>12,75</td></tr><tr><td>Evaluasi Internal</td><td>70</td><td>10%</td><td>7</td></tr><tr><td>Capaian Kinerja</td><td>90</td><td>20%</td><td>18</td></tr><tr><td>Total Nilai Akhir SAKIP</td><td>—</td><td>—</td><td>80,5</td></tr></tbody></table> Nilai Akhir SAKIP = 80,5	Komponen	Nilai	Bobot	Bobot x Nilai	Perencanaan Kinerja	80	30%	24	Pengukuran Kinerja	75	25%	18,75	Pelaporan Kinerja	85	15%	12,75	Evaluasi Internal	70	10%	7	Capaian Kinerja	90	20%	18	Total Nilai Akhir SAKIP	—	—	80,5	1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2.Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3.Sumber Data Internal Pemerintah (Input SAKIP): Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat, Biro Organisasi, Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Komponen	Nilai	Bobot	Bobot x Nilai																													
Perencanaan Kinerja	80	30%	24																													
Pengukuran Kinerja	75	25%	18,75																													
Pelaporan Kinerja	85	15%	12,75																													
Evaluasi Internal	70	10%	7																													
Capaian Kinerja	90	20%	18																													
Total Nilai Akhir SAKIP	—	—	80,5																													

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
2.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ IPG dihitung dengan membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki, untuk melihat perbandingan kesenjangan pembangunan antara keduanya. Nilai IPG yang mendekati angka 1 (atau 100 dalam skala 0-100) menunjukkan kesetaraan yang lebih baik, sementara nilai yang jauh dari 1 menunjukkan kesenjangan yang lebih besar.	1.DP3APPKB Kabupaten/ Kota, se-Kalimantan Tengah. 2.Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender. 3.Data publis lewat Huma data.go.id
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
		Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3APPKB Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem data serta informasi dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100	Dinas P3APPKB Kabupaten /Kota Se Kalimantan Tengah
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di provinsi.	1.Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
3.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	$\text{Skor KLA} = \frac{\text{Jumlah skor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah indikator total}} \times 1000$ Keterangan: - Jumlah skor yang dipenuhi= jumlah indikator yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. - Jumlah indikator total= jumlah total indikator yang dinilai	situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Penghitungan IPA dilakukan dengan cara: 1. Normalisasi data tiap indikator (skala 0–1). 2. Rata-rata per dimensi → menghasilkan nilai indeks tiap dimensi. 3. Rata-rata antar dimensi → menghasilkan nilai IPA total (0–100). Nilai semakin tinggi (mendekati 100) menunjukkan perlindungan anak semakin baik. Nilai rendah mengindikasikan masih banyak kasus kekerasan atau risiko perlindungan. Jumlah Nilai indikator kluster $\text{Nilai Kluster} = \frac{\text{Jumlah indikator}}{\text{Jumlah indikator}}$ $\text{IPA} = \frac{\sum (\text{Nilai Kluster} \times \text{Bobot})}{5}$	situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak dibagi Jumlah Anak (0-17 tahun) dikali 10.000	1. Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (kesehatan, hukum, sosial dan psikologis) dibagi Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi dikali 100.	1. Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi Anak Seluruh Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dikali 100.	1. Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 100$ Keterangan: ASFR = Age Specific Fertility Rate Bi = jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i. Pi = jumlah wanita kelompok umur i. i = kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun. Membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah Wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam satuan jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada kelompok usia 15-19 tahun.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.portal Satu Data Indonesia
		Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut: $TFR = \frac{1}{1.000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right]$ Keterangan: TFR = Total Fertility Rate ASFR = Age Specific Fertility Rate Bi = jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i. Pi = jumlah wanita kelompok umur i. i = kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.portal Satu Data Indonesia

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut: $IPBK = \sqrt[5]{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5}$ Atau rumus menggunakan Excel $IPBK = (D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5)^{(1/5)}$ IPBK menggunakan skala 0-100, bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	Jumlah seluruh PUS yang menggunakan kontrasepsi modern (peserta KB aktif) dibagi dengan jumlah total PUS dikali 100%. Perhitungan mCPR berguna untuk mengetahui akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Median dihitung dari data distribusi usia perkawinan pertama dengan cara mengurutkan usia dan menemukan nilai tengah. Data ini merujuk pada usia ketika 50% dari seluruh wanita dalam rentang usia tertentu (umumnya 25-49 tahun) telah melangsungkan perkawinan pertama kali.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: a. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
			b. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern sebagai berikut: Rumus Perhitungan: Perempuan usia 15–49 tahun yang saat ini menggunakan alat/cara KB modern (Pil, suntik, implant, IUD, kondom, steril wanita/pria,) dibagi Semua perempuan usia 15–49 tahun yang ingin menghindari atau menunda kehamilan.	
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) /Unwanted Pregnancy	Rumus: Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti dibagi ibu hamil saat pendataan dikali 100. Contoh Perhitungan : Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti: 40.000 kasus. Total kehamilan: 100.000 kasus. $\text{Persentase KTD} = (40.000 / 100.000) \times 100 = 40\%$ Artinya, 40% dari semua kehamilan yang terjadi dalam populasi tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Menjumlahkan PUS bukan peserta KB modern yang Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), lalu dibagi dengan total keseluruhan PUS dan dikalikan 100%.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data												
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga dihitung dengan cara menjumlahkan skor dari seluruh indikator, kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks (0–100). Klasifikasinya: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai Indeks</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Berkembang</td><td>0 – 49,99</td><td>Keluarga masih rentan dan butuh intervensi</td></tr><tr><td>Tumbuh</td><td>50 – 74,99</td><td>Keluarga mulai mandiri namun belum sejahtera penuh</td></tr><tr><td>Berkembang Sangat Baik</td><td>75 – 100</td><td>Keluarga sejahtera dan berketahanan tinggi</td></tr></table>	Kategori	Nilai Indeks	Keterangan	Berkembang	0 – 49,99	Keluarga masih rentan dan butuh intervensi	Tumbuh	50 – 74,99	Keluarga mulai mandiri namun belum sejahtera penuh	Berkembang Sangat Baik	75 – 100	Keluarga sejahtera dan berketahanan tinggi	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
Kategori	Nilai Indeks	Keterangan														
Berkembang	0 – 49,99	Keluarga masih rentan dan butuh intervensi														
Tumbuh	50 – 74,99	Keluarga mulai mandiri namun belum sejahtera penuh														
Berkembang Sangat Baik	75 – 100	Keluarga sejahtera dan berketahanan tinggi														
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya (ILB) $= \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$ Keterangan: D_i= skor rata-rata tiap dimensi (hasil komposit dari beberapa indikator) n= jumlah dimensi Nilai ILB: 0 – 39:Lansia belum berdaya 40 – 59:Lansia cukup berdaya 60 – 79:Lansia berdaya 80 – 100:Lansia sangat berdaya	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait												
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Metode umum pembentukan indeks ini melibatkan: Skoring: setiap indikator diberi nilai berdasarkan jawaban responden (misal: skala Likert 1–5). Normalisasi: nilai tiap dimensi dinormalkan agar berada dalam rentang 0–100. Agregasi: rata-rata tertimbang dari seluruh dimensi dihitung untuk membentuk satu nilai indeks komposit. $Rumus = \frac{\sum(w_i \times S_i)}{\sum w_i}$ di mana: w_i= bobot dimensi ke-i S_i= skor dimensi ke-i	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait												

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Rumus: $= \frac{\text{Jumlah Kampung KB Mandiri}}{\text{Total Kampung KB}} \times 100\%$ Misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023: Total Kampung KB: 400 lokasi Kampung KB Mandiri: 120 lokasi Maka: $\frac{120}{400} \times 100 = 30\%$ Artinya 30% Kampung KB di Kalimantan Tengah sudah berstatus Mandiri, sedangkan sisanya masih dalam tahap Berkembang atau Tumbuh	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Januari 2026
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

